

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setelah “disempurnakan” di Departemen Dalam Negeri dan diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara, Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau RUU-PA kini sudah ada di DPR untuk dibahas. Sesuai dengan nota kesepahaman Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Oleh karena itu, penyusunan naskah RUU-PA tersebut bertujuan untuk mengakomodasi agar aturan yang telah ada benar-benar sempurna, sehingga nantinya dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat Aceh sebagai bagian dari penyelesaian masalah konflik Aceh secara menyeluruh.

Pada tanggal 26 Januari 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) sebagai langkah awal dimulainya pembahasan RUU tentang Pemerintahan Aceh.

“Hari ini Presiden sudah menandatangani surat kepada Pimpinan DPR untuk menyampaikan RUU tentang Pemerintahan Aceh untuk dibahas bersama DPR guna mendapatkan persetujuan bersama dengan prioritas utama,” papar Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (Media Indonesia, 26 /1/2006).

Sebelumnya pada tanggal 18 Mei 2003 kondisi Aceh memburuk, melalui Keppres Nomor 28/2003, Presiden Megawati menyatakan seluruh Nanggroe Aceh

militer sehingga enam bulan pada tanggal 6 November 2003, lalu pada tanggal 18 Mei 2004 status darurat militer diubah menjadi darurat sipil selama enam bulan dan diperpanjang lagi selama enam bulan pada tanggal 18 November 2004.

Bahkan anggota MPR yang berasal dari Aceh, Gozali Abbas Adan menyarankan pemerintah dan pihak GAM sebaiknya melakukan perundingan kembali, untuk menyelesaikan masalah "Serambi Mekah" itu secara damai, bukan dengan cara kekerasan atau operasi militer dengan memberlakukan status darurat militer (Gatra, 6/11/2003).

"Saya minta kepada Presiden Megawati dan Hasan Tiro tolong pakai hati yang sebenarnya, berundinglah, itu yang paling tepat, jangan berpegang pada gengsi masing-masing," katanya. Pemerintah harus bisa "menembak" hati seluruh rakyat Aceh agar tetap berada dalam satu bangsa, bukan hanya memerangi mereka yang justru akan menimbulkan dendam berkepanjangan. Diakuinya, berkaca pada pengalaman perundingan yang telah dijalankan menemui jalan buntu, tetapi hal itu bukan alasan untuk tidak berunding kembali (Gatra, 6/11/2003).

Kemudian pada tanggal 26 Desember 2004 lalu, Gempa dan tsunami yang melanda Aceh telah menyadarkan rakyat Aceh untuk segera mengakhiri konflik yang terjadi di Aceh, mereka sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.

Naskah RUU-PA bertujuan untuk memaksimalkan atau menegaskan kembali pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

"Draft RUU-PA yang telah disusun pasca perjanjian damai Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu akan disesuaikan dan dicari kesempurnaan dengan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Aceh. Karena dalam pelaksanaannya, Otsus Aceh memang masih ada kewenangan daerah belum maksimal, seperti pembagian hasil serta pendapatan dari pajak," kata Ketua Tim Perumus RUU-PA, Prof Abdullah Ali, di Banda Aceh. Hal terpenting yang justru dibutuhkan adalah mengawal RUU-PA agar benar-benar bisa dilaksanakan. Kalau RUU-PA ini bisa diimplementasikan dengan benar maka akan membawa kemakmuran bagi masyarakat Aceh (Kompas, 29/10/2005).

Di sisi lain juru bicara GAM Kamaruzzaman menyebutkan, " Bagaimanapun RUU-PA merupakan tindak lanjut implementasi nota kesepahaman Helsinki. Proses negosiasi dan kompromi sudah selesai dan kini ditunggu implementasi kesepahaman yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Sebagai bentuk konkret atas komitmen pemerintah, mestinya rumusan RUU harus sesuai dengan MoU secara mutlak" (Kompas, 6/5/2006).

Pelajaran mahal mungkin dipetik dari pernyataan salah seorang anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang menyebut RUU sudah 90 persen mengakomodasi aspirasi rakyat Aceh yang kemudian memancing perdebatan berkepanjangan (Kompas, 6/7/2006)

Sementara itu semua fraksi mengharap Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan di Serambi Mekah serta memperkuat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Mendagri M Ma'ruf, "Apabila ada masyarakat Aceh termasuk tokoh DPRD dan tokoh adatnya masih menolak UU Aceh yang dirumuskan, kemungkinan informasi yang diterima mereka masih kurang lengkap" (Media Indonesia, 6/7/2006).

Melihat adanya realitas tersebut, media mengemas dan menyajikan dalam bentuk berita. Berita yang dibuat tidak dapat terlepas dari opini dan keberpihakan wartawan yang membuatnya sehingga terjadi perbedaan sudut pandang atau penekanan berita yang disajikan antara media yang satu dengan media lainnya.

Surat kabar harian (SKH) Kompas dan Media Indonesia adalah contoh dari adanya perbedaan sudut pandang media dalam melihat dan menyajikan realitas sosial tersebut ke dalam bentuk berita. Baik Kompas maupun Media Indonesia memiliki komposisi pemberitaan yang berlainan dan cara tersendiri dalam membingkai dan mengkonstruksi suatu pemberitaan mengenai RUU-PA. Dalam hal ini Kompas dalam menyajikan berita cenderung sesuai dengan fakta realitas yang ada. Referensi yang diangkat oleh Kompas juga cenderung lebih halus dan tidak langsung pada arah pembicaraan, namun penekanan beritanya lebih tajam. Sedangkan pada Media Indonesia cenderung lebih moderat dalam mengemas suatu berita dan menyajikannya kembali sebagai realitas baru. Referensi yang diangkat oleh Media Indonesia

Perbedaan sudut pandang kedua media tersebut terlihat jelas pada sebuah realitas yang diberitakan oleh keduanya mengenai RUU-PA. Keduanya mengangkat sisi yang berbeda. Masing-masing media menyajikan berita pada proses berlangsungnya pembahasan RUU – PA. Pemberitaan pada Kompas dengan *Headline* pada tanggal 4 dan 6 Juli Kompas memberitakan tentang naskah RUU-PA hal tersebut terlihat dari *Headline* pada edisi 4 Juli : "RUU Aceh Beban Tanggung Jawab Elite Aceh" dan edisi 6 Juli 2006 dengan judul: "Menunggu Aturan untuk Rakyat". Dalam mengambil sumber beritanya, Kompas lebih menyoroti kalangan yang mengecam isi dan ketidaklayakan RUU-PA untuk disahkan, bahkan hasil akhir yang sudah ditandatangani tersebut justru menjadi beban bagi elite Aceh untuk mengimplementasikannya.

Hal ini berbeda dengan Media Indonesia yang lebih mengangkat sisi positif dari naskah RUU-PA. Teks berita pada tanggal 6 dan 8 Juli 2006, Media Indonesia memakai judul: "Pansus Setujui Bawa ke Paripurna" dan "Tidak Ada Alasan GAM Tolak RUU Aceh". Dalam berita ini Media Indonesia menyetujui disahkannya RUU-PA, dan pemerintah seolah memaksa rakyat Aceh untuk menerima UU Aceh, ...

Berikut ini beberapa berita yang diturunkan oleh kedua SKH tersebut:

Tabel 1.1 Berita Kompas tentang RUU-PA

Edisi	Judul Berita
4 Juli 2006	RUU Aceh Beban Tanggung Jawab Elite Aceh
6 Juli 2006	Menunggu Aturan untuk Rakyat

Sumber: Kompas, yang disusun kembali oleh peneliti

Tabel 1.2 Berita Media Indonesia tentang RUU-PA

Edisi	Judul Berita
6 Juli 2006	Pansus Setujui Bawa Ke Paripurna
8 Juli 2006	Tidak Ada Alasan GAM Tolak RUU Aceh

Sumber: Media Indonesia, yang disusun kembali oleh peneliti

Dari dua berita yang disajikan oleh kedua media tersebut muncul opini publik yang majemuk mengenai RUU-PA, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dan pembingkaiannya oleh media. Perbedaan ini dapat dilihat dari judul berita yang disajikan oleh kedua media tersebut. Judul berita Kompas pada 4 Juli 2006, "RUU Aceh Beban Tanggung Jawab Elite Aceh" dan "Menunggu Aturan untuk Rakyat" menunjukkan bahwa RUU-PA akan memberikan beban yang berat bagi elite Aceh dan rakyat Aceh. Sedangkan judul berita Media Indonesia pada 6 Juli 2006, "Pansus Setujui Bawa Ke Paripurna" dan 8 Juli 2006, "Tidak Ada Alasan GAM Tolak RUU Aceh" menunjukkan bahwa RUU-PA akan memberikan manfaat yang besar bagi Aceh dan rakyat Aceh.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari paparan pada latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Surat Kabar Harian Kompas dan Media Indonesia mengemas pemberitaan realitas sosial tentang RUU-PA?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembingkaiian tentang RUU-PA, antara Surat Kabar Harian Kompas dan Media Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bagaimana Surat Kabar Harian Kompas dan Media Indonesia mengemas atau membingkai berita tentang RUU-PA.
2. Mengetahui perbedaan apa saja yang mempengaruhi pembingkaiian tentang RUU-PA, antara Surat Kabar Harian Kompas dan Media Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan kajian bagi yang meminati studi analisis *framing*. Analisis *framing* berkembang dari pandangan konstruksionis yang melihat bagaimana media dan berita dilihat dan pada akhirnya dapat mengetahui bagaimana masing-masing media dalam membingkai sebuah berita

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para khalayak untuk lebih mengetahui bagaimana berita itu disajikan dan dapat memahami bagaimana cara media mengemasnya.

E. KERANGKA TEORI

E.1 Komunikasi sebagai Produksi Pesan dan Makna

John Fiske melihat suatu realitas dapat dipahami dengan dua cara: *pertama*, komunikasi sebagai proses transmisi pesan. Pandangan ini juga disebut sebagai pandangan positivistik. *Kedua*, komunikasi dilihat sebagai produksi pesan dan pertukaran makna atau disebut juga pandangan konstruksionis.

The structure of this reflects the fact that there are two main schools in the study of communication. The first sees communication as the transmission of messages. It is concerned with how senders and receivers encode and decode... the second school sees communication as the production and exchange of meanings. It is concerned with how messages, or texts, interact with people in order to produce meanings. That is, it is concerned with the role of texts in our culture" (Fiske, 1990: 2).

(Susunan buku ini menggambarkan fakta- fakta bahwa ada dua paradigma besar dalam ilmu komunikasi, pertama komunikasi dilihat sebagai proses pengiriman pesan, ini berhubungan dengan bagaimana pengirim dan penerima pesan... kedua ilmu komunikasi dilihat sebagai produksi dan pertukaran makna, ini berhubungan dengan bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan khalayak dalam produksi makna untuk itu titik perhatiannya dengan struktur

Pandangan positivis melihat komunikasi sebagai bentuk pengiriman pesan, proses tersebut terjadi bagaimana pesan terkirim dari pengirim ke penerima bagaimana proses yang terjadi dalam pengiriman tersebut.

Shanon dan Weaver menyebut model ini dengan istilah lain yaitu komunikasi transmisi.

Komunikasi transmisi suatu sumber yang menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima dan si penerima mencipta ulang atau menyandi balik pesan tersebut. Komunikasi transmisi bersifat *linier*, karena melihat komunikasi mengalir dari komunikator ke komunikan, kemudian komunikator dilihat sebagai pihak yang aktif sedangkan komunikan sebagai pihak yang pasif. Dalam model ini, komunikasi transmisi menitikberatkan pada bukan bagaimana komunikan menerima pesan, akan tetapi sejauh mana pesan yang dimaksudkan oleh komunikator sesuai dengan yang diterima oleh komunikan (Shanon dan Weaver dalam Nightingale, 1996: 31).

Sehingga yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana pesan dari komunikator bisa sampai ke komunikan, dalam proses ini tentu saja pesan yang disampaikan dengan yang diterima belum tentu sama.

Secara umum model komunikasi transmisi menyertakan pengirim (*sender*), penerima dan medium melalui mana pesan-pesan dikirimkan. Gangguan (*noise*) adalah sesuatu yang terjadi di antara pengiriman tersebut. Dalam konteks media cetak, medium adalah percetakan yang menghasilkan suatu surat kabar atau media cetak, pengirim (*sender*) adalah wartawan atau editor dan penerima pesan adalah setiap individu yang membaca media cetak tersebut. Sedangkan *noise* atau gangguan terjadi di antara proses tersebut, gangguan tersebut bisa terjadi dikarenakan oleh, tulisan yang buram sehingga tidak dapat dibaca, salah penulisan sumber berita, salah ketik dan lain-lain.

Penggambaran proses komunikasi seperti ini terlihat *mekanistik* dan *simplistik*. Ketika komunikasi berlangsung individu yang mengirim

penyandian pesan agar dapat diterima dan dipahami oleh individu penerima. Sedangkan proses menerima pesan pada dasarnya adalah proses mengurai sandi (*decode*) dan menyandi ulang agar dapat diterima sesuai dengan yang dimaksudkan pengirim (Lewin dan Slade dalam Eriyanto, 2002: 38-39).

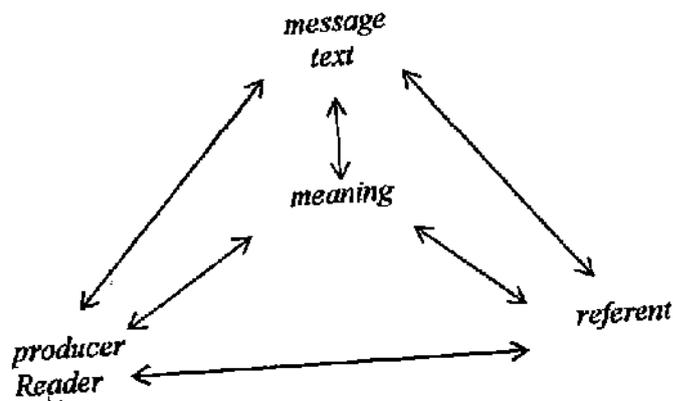
Maksud pengiriman pesan mungkin, diberitahukan atau tidak diberitahukan, sadar atau tidak sadar, tetapi harus diperoleh dari analisa. Pesan adalah apa yang disampaikan oleh pengirim ke penerima dengan pemahaman yang luas (Fiske 1990:3).

Penyampaian pesan bukan hanya dipahami sebagai sebuah pesan yang disampaikan dari A ke B saja, tetapi pesan sudah dipengaruhi oleh realitas yang berada diluar pesan itu. Pesan tidak dilihat secara paralel atau linier semata tapi pesan itu sudah dinamis, dimana ada pengaruh lain yang membuat pemahaman tentang pesan menjadi beragam.

The message, then, is not something sent from A to B, but an element in a structured relationship whose other elements include external reality and the producer/ reader. Producing and reading the text are seen as parallel, if not identical, processes in that they occupy the same place in this structured relationship. We might model this structure as a triangle in which the arrows represent constant interaction; the structure is not static but a dynamic practice (Fiske, 1990:3-4).

(Pesan, dengan demikian bukanlah sesuatu yang dikirim dari A ke B, tetapi sebagai bagian dalam struktur hubungan diantara lain realitas luar dan pembuat/ pembaca. Membuat dan membaca teks tidak semata secara paralel, jika tidak serupa, proses itu menempati tempat yang sama dalam struktur hubungan. Kita dapat lihat model hubungan ini sebagai segitiga dimana anak panah menunjukkan interaksi yang konstan hubungan ini tidak static tapi sebuah praktik yang dinamis)

Skema 1.1



Sumber: John Fiske. *Introduction to Communication Studies*, (1990: 4).

Berbeda dengan pandangan positivis, pandangan konstruksionis melihat bahwa komunikasi adalah proses produksi dan pertukaran makna. Titik fokus dari pandangan ini adalah bagaimana pesan diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan tersebut secara aktif ditafsirkan oleh individu penerima (Eriyanto, 2002:40).

Setiap individu merangkai perkataan tertentu dalam memberikan gambaran tentang realitas. Setiap komunikator akan memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu peristiwa dalam konteks pengalaman, pengetahuannya sendiri dalam menyampaikan pesan.

E.2 Paradigma Konstruksionisme

Dalam kajian ilmu komunikasi secara umum ada 2 paradigma besar yaitu pandangan efek media dan pendekatan konstruksionis.

Paradigma konstruksionisme memandang teks media merupakan hasil dari konstruksi media terhadap realitas. "Realitas bukanlah sesuatu yang terberai, seakan-akan ada, tetapi realitas sebaliknya diproduksi" (Carey dalam Eriyanto, 2002:19-20).

Paradigma konstruksionisme mempunyai empat sifat, yaitu:

1. Secara antologis bersifat relatif dengan memahami realitas merupakan hasil dari konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.
2. Secara epistemologi bersifat subyektif maksudnya pemahaman tentang sesuatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.
3. Secara metodologis bersifat reflektif dialektik. Pendekatan konstruksionis menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui sebuah metode kualitatif, peneliti terlibat langsung dan berinteraksi dengan obyek yang diteliti.
4. Secara axiologis pendekatan ini memandang nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai *passionate participant*. Fasilitator yang menjembatani keragaman subyektifitas pelaku sosial.
(Agus Salim, 2006: 71)

Pendekatan konstruksionis tidak melihat media sebagai saluran atau sarana penyampai pesan dari komunikan kepada komunikator melainkan sebagai proses yang dinamis yang menekankan kepada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tertentu tentang realitas sebagaimana diketahui bahwa pendekatan konstruksionis mempunyai 2 karakteristik:

Pertama, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan oleh seseorang dalam suatu pesan. *Kedua*, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan ini memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator, dan dalam sisi penerima ia memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan (Burton dalam Eriyanto, 2002:41-42).

E.3 Realitas Sosial dan Ideologi

E.3.1 Konstruksi Realitas Sosial

Paradigma atau gagasan dari konstruksionis mengenai konstruksi realitas dalam teks berita di media cetak dipandang sebagai konstruksi atas realitas, karena suatu peristiwa yang sama berpotensi untuk dikonstruksi secara berbeda oleh berbagai media. Sebagai contoh, dalam satu peristiwa, wartawan bisa saja mempunyai pandangan dan konsep yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa tersebut, hal seperti itu dapat dilihat dari bagaimana wartawan dalam mengkonstruksi peristiwa tersebut untuk ditulis kedalam bentuk berita.

Konsep konstruksionisme pertama kali dikenalkan oleh ahli sosiolog interpretatif, Peter R. Berger dan Thomas Luckman, dan kemudian dikenal sebagai konstruksi sosial. Konstruksi sosial digambarkan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara subyektif (Burhan, 2001: 10).

Realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang ditakdirkan dari yang kuasa, akan tetapi realitas terjadi karena dibentuk dan dikonstruksi oleh manusia. Oleh karenanya setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas (Berger dalam Eriyanto, 2002:14).

Proses konstruksi realitas, tiga tahapan peristiwa:

1. **Eksternalisasi.** Eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun kegiatan fisik.
2. **Objektivasi.** Objektivasi adalah hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari hasil kegiatan eksternalisasi manusia tersebut.

3. **Internalisasi.** Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial (Berger dalam Eriyanto,2002:14).

Pendekatan konstruksionis mempunyai aturan tersendiri dalam menilai bagaimana media cetak, wartawan dan berita dilihat. *Pertama*, peristiwa merupakan hasil dari konstruksi.

Realitas hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan, kemudian realitas juga tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Realitas bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas tersebut dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda (Herbert dalam Eriyanto, 2002:19).

Pandangan konsepsi Positivis realitas ada yang bersifat eksternal, jadi realitas itu ada dan hadir sebelum wartawan itu tiba. Kemudian realitas juga ada yang bersifat objektif, artinya peristiwa yang terjadi harus diambil dan diliput oleh wartawan secara utuh tanpa mengurangi atau menambahkan salah satu detail yang terjadi di lapangan. Konsepsi positivis bertentangan dengan konsepsi konstruksionis, fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal mengambil, ada dan menjadi bahan dari berita, fakta adalah hasil dari konstruksi.

Realitas adalah bukan sesuatu yang terberi, seakan-akan ada, bahkan sebaliknya, realitas adalah terjadi karena fakta (Carey, 1989:25). Burhan Bungin mengemukakan bahwa dalam kenyataan, realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik di dalam maupun di luar realitas tersebut.

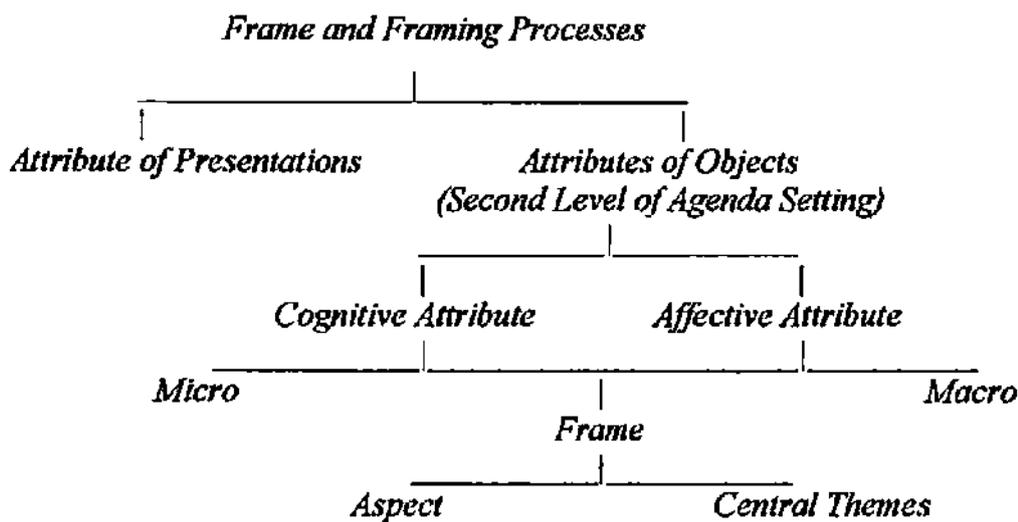
Realitas itu memiliki makna ketika realitas sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara subyektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara obyektif. Individu mengkonstruksikan realitas sosial dan mengkonstruksikannya kembali dalam sebuah realitas, memantapkan realitas tersebut berdasarkan subyektifitas individu lain dalam institusi sosialnya (Burhan, 2001:9).

Dalam penelitian konstruksionis, dianggap tidak ada realitas, yang ada adalah konstruksi media atas realitas. Berbicara tentang rekonstruksi realitas media tidak terlepas dari agenda setting yang dilakukan media. Stephen D. Resse, Oscar H Gandy, Jr, dan August E. Grant dalam buku mereka yang berjudul *Framing Public Life* mengemukakan bahwa dalam agenda setting terbagi menjadi dua level. "*The first level of agenda setting is the transmission of obyek salience, and the second level is the transmission of attribute salience*" (Stephen, Oscar, Grant, 2001:69). Level pertama agenda setting adalah pengiriman obyek yang menonjol dan level kedua adalah pengiriman atribut yang menonjol.

Pada level kedua agenda setting menunjukkan bahwa media menyampaikan pada khalayak bagaimana cara berpikir tentang suatu obyek. "*Explicit attention to the second level, attribute agenda setting, further suggest that media also tell us how to think about some object. It is here the agenda setting and framing share common ground*" (Stephen, Oscar, Grant, 2001:69). Pemberian atribut pesan yang menonjol pada media merupakan bagian dari proses framing media. Ada pertemuan antara agenda setting dan framing dimana level kedua dari agenda setting merupakan bagian dari proses agenda setting.

Agenda setting memainkan peran yang sangat penting dalam proses rekonstruksi realitas yang media lakukan. Rekonstruksi realitas yang dilakukan media diwujudkan dalam proses framing media. Pada proses ini terdapat level kedua agenda setting yaitu pemberian atribut pesan yang menonjol. Hal tersebut ditunjukkan dalam skema berikut :

Skema. 1.2 Proses Framing Media



Sumber: *Framing Public Life: Perspectives Media and our Understanding of the Social World* (Stephen, Oscar, Grant, 2001:71).

E.3.2 Pendefinisian Realitas

Media cetak mempunyai andil yang besar dalam mendefinisikan realitas. Bagaimana wartawan membingkai realitas dengan pilihan-pilihan kata akan mempengaruhi bagaimana fakta yang ditampilkan wartawan tersebut dapat dipahami dan dimaknai. Oleh karena itu, bagaimana media cetak memaknai peristiwa yang diangkat menjadi sajian-sajian fakta yang dibawakan menjadi berita sangat berpengaruh

ada dua cara yang akan dilakukan oleh media. *Pertama*, pemilihan fakta, *kedua* menuliskan fakta.

Proses pemilihan fakta didasarkan pada asumsi bahwa wartawan tidak mungkin melihat peristiwa pada perspektif. Dalam memilih fakta terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Dalam proses menuliskan fakta berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan ke khalayak. Gagasan tersebut diungkapkan dengan kata, kalimat, proposisi dan bantuan aksentuasi foto dan gambar (Fairclough, 1992:89).

Bagaimana mendefinisikan realitas sebenarnya tidak jauh bagaimana subjektifnya wartawan yang meliput dilapangan. Pendefinisian ini berkaitan dengan bagaimana wartawan memandang peristiwa yang terjadi, bagaimana pemilihan kata yang akan dibahasakannya dalam berita, atau pilihan gambar, foto yang akan memperkuat prasangka khalayak pada suatu peristiwa yang akan diliput. Kemudian yang tidak dapat ditinggal adalah bagaimana pemilihan sumber yang akan memperkuat dugaan pada peristiwa yang terjadi.

Proses pemilihan fakta tidak terlepas dari bagaimana media cetak memaknai berita atau peristiwa tersebut. Wartawan-lah yang mempunyai andil besar dalam pemilihan peristiwa dan narasumber yang kemudian dituangkan dalam bentuk berita. Peristiwa yang sama mungkin saja disajikan secara berbeda antara wartawan satu dengan wartawan yang lain. Hal ini disebabkan karena media memiliki

Proses penulisan fakta sangat berhubungan dengan pemakaian bahasa di dalam menulis realitas. Kata-kata yang digunakan oleh media bukan saja mengikuti kode etik jurnalistik, akan tetapi terkait dengan politik bahasa. Pemilihan bahasa dalam kata-kata tertentu dapat menciptakan realitas yang tertentu pula. Kata-kata tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu tetapi juga membatasi persepsi pembaca dan mengarahkan pada cara berpikir dan keyakinan tertentu (Burke dan Kenneth, 1992:31).

Kalimat atau kata yang hadir pada khalayak mencoba memberikan gambaran peristiwa pada khalayak untuk mengetahui realitas. Hendaknya realitas tersebut dipahami sebagai sekedar kata yang mencoba didefinisikan oleh media, karena jika memahami realitas tersebut dengan gambaran yang diberikan oleh media maka akan ada realitas lain hadir berdasarkan persepsi dan konstruksi realitas individu lain. Misalnya kata restrukturisasi dan pergantian akan memiliki makna dan pemahaman yang berbeda. Kata restrukturisasi lebih terkesan sopan dan tidak menyinggung perasaan, lain lagi bila dibandingkan dengan pergantian terkesan angkuh dan egois.

Apa yang dilaporkan media seringkali merupakan hasil dari pandangan mereka (predisposisi perseptuil) wartawan ketika melihat dan meliput peristiwa (Eriyanto, 2002:83), sehingga dengan menggunakan analisis framing akan dapat mengetahui sebuah peristiwa yang sama dikemas secara berbeda oleh wartawan yang menghasilkan berita berbeda.

E.3.3 Hal-hal yang Mempengaruhi Pendefinisian Realitas suatu Media

Sebuah berita tidak sama persis dengan apa yang terjadi dilapangan. Proses

menulis realitas sesuai dengan realitas sebenarnya (*mirror of reality*), akan tetapi berita yang dimuat sudah melalui berbagai proses yang panjang dan rumit, dan telah dipengaruhi oleh banyak faktor.

Karena banyak kepentingan dan pengaruh yang dapat mengintervensi media, sehingga niscaya akan terjadi pertarungan dalam memaknai realitas dalam presentasi media (Sudibyo, 2001: 7).

Ada lima faktor yang mempengaruhi pendefinisian sebuah realitas sosial oleh media:

Pertama, faktor individual. Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesionalisme pengelola media. Latar belakang kehidupan wartawan seperti jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, budaya akan mempengaruhi pola pemberitaan (Shoemaker & Reese, 1996:102).

Media dalam menurunkan sebuah berita selalu dipengaruhi oleh aspek-aspek personal wartawan dan pengelola media, dampak dari hal tersebut media akan memutuskan mana yang akan dimuat dan mana yang tidak akan dimuat untuk dijadikan sebuah berita.

Kedua, rutinitas media. Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita, rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk melalui proses dan tangan siapa saja sebelum sampai ke proses cetak (Shoemaker & Reese, 1996:137).

Jika media menampilkan aspek tertentu bukan berarti media tersebut memerankan peran negatif dalam proses pembentukan produksi berita untuk mengelabui publik. Hal demikian bisa saja terjadi, namun semua proses seleksi menjadi sebuah rutinitas kerja beredaksional yang dianggap sebagai suatu bentuk

rutinitas organisasi media. Kemudian disinilah seorang redaktur memegang sebuah kendali pemberitaan, redaktur memiliki otoritas penuh atas pemilihan suatu peristiwa yang layak atau tidak layak untuk dijadikan sebuah berita.

Ketiga, sebuah pembentukan berita dipengaruhi oleh institusi media. Wartawan, editor, layouter dan fotografer, adalah bagian kecil dari institusi media. Pengelola media dan wartawan bukanlah orang tunggal yang menentukan sebuah berita, lebih dari itu, ada aspek lain yang mempengaruhi seperti bagian pemasaran, pengiklan dan pemodal (Shoemaker & Reese, 1996:172-173).

Beberapa hal tersebut sangat mempengaruhi sebuah peristiwa untuk dijadikan berita. Kepentingan ekonomi seperti pemilik modal, pengiklan dan pemasaran selalu mempertimbangkan sebuah peristiwa yang dapat menaikkan angka penjualan atau oplah media. Misalnya, salah satu pejabat melakukan korupsi. Kalau peristiwa tersebut memiliki bobot berita yang dapat menaikkan tiras penjualan, maka berita tersebut harus dijadikan sebagai *headline* dalam medianya. Meskipun diketahui bahwa pejabat tersebut adalah salah satu pemilik modal dan saham dimedianya.

Keempat, ekstramedia. Pada level ini, kenyataannya sebuah media hanya bagian dari sistem yang besar, kompleks yang sedikit banyaknya dalam banyak kasus mempengaruhi pemberitaan media. Ada tiga faktor diluar lingkungan media yang mempengaruhi pemberitaan yaitu:

Faktor pertama yang datang langsung dari sumber berita.

Sumber berita tidak dilihat sebagai pihak yang netral dalam memberikan informasi berita. Sumber berita tentu saja

yang sekiranya baik bagi dirinya, dan mengembargo informasi yang tidak baik bagi dirinya (Shoemaker & Reese, 1996: 219-220).

Sumber informasi juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan alasan-alasan tertentu, misal sumber berita memberikan informasi kepada khalayak untuk membentuk dan membangun citra positif agar khalayak atau publik turut mendukung argumentasi kebenarannya.

Faktor sumber penghasilan media. Pada tahapan ini sebuah institusi media dalam menentukan kelanggannya, media membutuhkan dana dalam hal ini adalah iklan. "Untuk bertahan hidup kadang kala media harus berkompromi dengan sumberdaya yang menghidupi mereka. Misalnya media tidak akan memberitakan kasus tertentu yang berhubungan dengan iklan" (Sudibyo, 2002:11). Akibatnya pemberitaan akan tunduk dan patuh terhadap pengiklan, kemudian yang terjadi adalah subjektivitas media akan terancam. Bagaimanapun media tidak memiliki opsi lain apa bila keburukan dari salah satu pelanggan iklan dijadikan suatu kasus atau bahan pemberitaan ke publik, maka pengiklan tidak segan-segan untuk mengembargo media tersebut dengan cara berhenti langganan atau menjadi pelanggan iklan tetap.

Faktor pihak eksternal media. Seperti pemerintah dan lingkungan bisnis.

Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media. Dalam negara yang otoriter misalnya, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam menentukan berita apa yang disajikan. Ini karena dalam negara yang otoriter, negara menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Pemerintah dalam banyak hal memegang lisensi penerbitan (Sudibyo, 2001:12).

Sehingga media jika ingin tetap terbit harus selalu mengikuti aturan-aturan dan batasan-batasan dari pemerintah. Keadaan ini tentu saja berbeda dengan negara yang demokratis, campur tangan negara praktis tidak ada, justru yang besar adalah pengaruh dari lingkungan pasar dan bisnis.

Kelima, level ideologi. Dalam konteks ini, ideologi diartikan sebagai kerangka pikir yang dipakai oleh setiap individu untuk melihat realitas dan bagaimana individu tersebut menghadapinya. Ideologi pada tataran ini adalah suatu konsep yang abstrak, yang berhubungan dengan konsepsi individu dalam menafsirkan suatu realitas. Ideologi yang abstrak diartikan sebagai siapa yang berkuasa dan siapa yang menentukan bagaimana media tersebut akan dipahami oleh publik (Shoemaker & Reese, 1996:251).

Pada level ideologi, media berhak menentukan apa yang akan ia sajikan kepada publik, pada saat itu media akan menerapkan kekuasaannya untuk membentuk opini khalayak sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan dalam media terkait bagaimana jurnalis didikte dan dikontrol dalam memberitakan peristiwa dengan perspektif tertentu.

Misal, komunis adalah ideologi terlarang pada masa era Orde Baru. Oleh karena ideologi tersebut terlarang, maka setiap institusi media tidak memberanikan diri untuk memberitakan hal-hal yang bersangkutan paut dengan komunis.

E.3.4 Realitas dan Ideologi

Ideologi dianggap sebagai kesadaran palsu, sistem berfikir yang sudah terkena distorsi, entah disadari, entah tidak. Biasanya ideologi sekaligus dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaan secara tidak wajar (Magnis-Suseno dalam Sobur, 2001:66).

Ideologi sebagai kesadaran palsu secara kontinu diafirmasi media masa. Tragisnya, masyarakat menganggap semua yang ditampilkan media masa merupakan cermin realitas sosial, menjadi aksioma yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya (Sukirman, 2005).

Setiap mendefinisikan realitas individu tidak dapat meninggalkan ideologinya dalam memandang fakta. Ideologi adalah pemahaman yang abstrak, sehingga pemahaman tersebut diterjemahkan secara berbeda oleh setiap individu. Perbedaan yang terjadi pada tiap individu dipengaruhi atas pengetahuan yang sudah terkontaminasi dengan perasaan, kepentingan, dan faktor-faktor yang lain, sehingga pengetahuan yang subjektif itu dinamakan dengan ideologi (Lembaga Studi Perubahan Sosial, 2000:156).

Tidak ada batasan-batasan pada ideologi, baik jangkauannya terhadap semua aspek kehidupan kita maupun historis.

Kekuatan ideologi terletak pada kemampuan untuk melibatkan kelompok subordinat dalam prakteknya sehingga membawa mereka untuk mengkonstruksi identitas sosial/ subjektifitas untuk mereka sendiri yang mereka terlibat didalamnya, dan melawan kepentingan-kepentingan sosial politik mereka sendiri (Althusser dalam Fiske, 1990: 228).

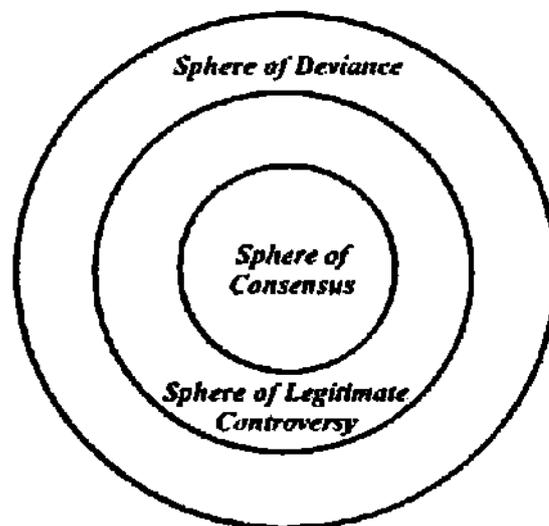
Diantara berbagai fungsi dari media dalam mendefinisikan realitas adalah ideologi sebagai mekanisme integrasi sosial. Media berfungsi menjaga nilai-nilai kelompok dan mengontrol bagaimana nilai-nilai kelompok itu dijalankan. Untuk mengintegrasikan masyarakat dalam tata nilai yang sama, pandangan atau nilai harus didefinisikan sehingga keberadaannya diterima dan diyakini kebenarannya (Eriyanto, 2002:122).

Gambaran atau ilustrasi menarik untuk menjelaskan bagaimana berita

dipengaruhi dalam mata ideologi. Ada tiga bidang ideologi dalam jurnalistik

Pertama, bidang penyimpangan (*sphere of deviance*), *kedua*, bidang kontroversi (*Sphere of legitimate controversy*) dan *ketiga*, adalah bidang konsensus (*sphere of consensus*). Ketiga bidang ideologi tersebut dapat menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologi pembaca (Hall dalam Eriyanto, 2002:127).

Skema 1.3



Sumber: Shoemaker & Reese. *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, (1996: 227).

Bidang-bidang tersebut dapat menjelaskan bagaimana realitas dapat dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologis. Bidang penyimpangan memberikan gambaran dimana peristiwa disepakati secara umum dalam masyarakat sebagai sebuah tindakan yang dipandang buruk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Bidang ketiga adalah konsensus. Konsensus menunjukkan bagaimana realitas tertentu dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok.

E.4 Framing dan Pandangan Publik

Gagasan framing pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 (Sudibyo dalam Sobur 2004:161). Konsep framing media adalah penting sebab hal ini suatu alternatif pada “penyimpangan dan obyektifitas” paradigma lama, yang membantu kita memahami pelaksanaan komunikasi massa (Stephen, Oscar, Grant, 2001: 96).

Mulanya *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Goffman pada tahun 1974, yang mengandaikan framing sebagai kepingan – kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas (Sobur, 2001:161-162).

Konsep framing dapat menawarkan suatu alternatif kepada paradigma yang menyimpang dan obyektifitas yang telah populer dalam riset mengenai komunikasi masa selama bertahun-tahun (Stephen, Oscar, Grant, 2001: 96). Hackett berpendapat bahwa peneliti perlu menggeser fokus mereka dari studi penyimpangan dan obyektifitas kepada studi ideologi dalam berita.

Konsep framing sebagai suatu pendekatan yang bermanfaat sebab hal itu berpotensi dalam membongkar dan membuka/ menampakkan asumsi yang tersembunyi. Konsep ideologi melebihi konsep penyimpangan. Ia membantah ideologi itu menyediakan suatu kerangka di mana media berita sering menyajikan peristiwa (Hackett dalam Stephen, Oscar, Grant, 2001: 96).

Framing media merupakan hal yang penting, langkah yang halus/ cerdas tetapi berpengaruh kuat pada pendengarnya, bahkan dengan tujuan untuk membantu merobohkan seorang presiden (Stephen, Oscar, Grant, 2001: 97).

Konsep framing memberikan wawasan baru dan pengaruh yang mendalam mengenai cara berkomunikasi yang praktis, termasuk wartawan, perencana kampanye komunikasi, dan aktifis sosial. Memilih framing untuk suatu cerita adalah keputusan paling utama bagi wartawan dalam editor surat kabar (Smith dalam Stephen, Oscar, Grant, 2001: 98).

Wartawan sering terbiasa memilih suatu bingkai permasalahan dengan cara memilih siapa musuh atau saingan, berlawanan atau bertolak belakang dalam situasi ini wartawan membutuhkan penggunaan bingkai bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat dan dapat diterima.

Framing pada dasarnya adalah metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita, cara melihat berpengaruh pada hasil akhir dari kontruksi realitas sosial “Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas, juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media” (Eriyanto, 2002:10). Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagaimana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, dalam Sobur 2001:162).

Peristiwa yang sama bisa diberitakan berbeda oleh media, seperti misalnya kasus di KPU, ada media yang memberitakan bahwa Mulyana W Kusuma (anggota KPU) adalah seorang koruptor yang ingin memberi sogokan pada salah seorang anggota KPK. Tetapi ada juga media yang memberitakan bahwa Mulyana W Kusuma hanyalah sebagai korban dari sebuah skenario. Kedua berita tersebut dari satu peristiwa yang sama oleh tetapi berita yang tampil berbeda, perbedaan itu terjadi

karena peristiwa tersebut dipahami dan dikonstruksi secara berbeda oleh media. Ada dua esensi utama dari framing tersebut yaitu:

“*Pertama*, bagaimana peristiwa itu dimaknai, ini berhubungan mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. *Kedua*, bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan” (Eriyanto, 2002: 10).

Framing sebagai proses yang tidak berhubungan dari strategi politis yang memanfaatkan keunggulan simbol atau lambang untuk mengambil bagian dalam memainkan perasaan sekitar isu kebijakan masyarakat. Kemudian, kita sudah berargumentasi bahwa Framing adalah suatu bagian penting dari pandangan publik, dengan merubah situasi dan kunci permasalahan dalam menyusun analisa, membantu suatu gambaran dengan menghubungkan berbagai pengertian dalam Framing. (Pan & Kosicki dalam Stephen, Oscar, Grant, 2001: 35).

Sehingga dari pembicaraan interaktif mencakup berita, diskusi di televisi, radio, percakapan melalui internet, kelompok berita dan media baru lainnya itu akan muncul berbagai isu, dan pada akhirnya akan memunculkan pandangan publik.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, kerangka teori, objek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik yang digunakan dalam menganalisis data maka dapat disimpulkan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

“Analisis kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain” (Strauss dan

Analisis yang bisa digunakan untuk mengungkap konstruksi yang dilakukan media (berita atau isu mengenai RUU-PA pada Surat Kabar Harian Kompas dan Media Indonesia) salah satunya adalah analisis framing. Analisis Framing adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana realitas dikonstruksi dan dibentuk oleh media, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media, dalam hal ini bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikan kepada khalayak pembaca, namun pada akhirnya peneliti tidak membandingkan sejauh mana antara konstruksi realitas dengan realitas sebenarnya, tetapi bagaimana konstruksi antar berbagai surat kabar harian dalam memaknai sebuah realitas.

Penelitian ini melakukan analisis isi teks media dengan menggunakan paradigma konstruksionisme dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan analisis data framing.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah dua SKH, yaitu Kompas edisi 4 dan 6 Juli 2006 dan Media Indonesia edisi 6 dan 8 Juli 2006. Pemilihan tanggal tersebut karena bertepatan dengan babak akhir dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hadirnya dua realitas yang berbeda dalam menerjemahkan dan menjadikan alasan mendasar dalam penelitian ini. Dalam hal ini SKH Kompas lebih kritis dalam menyajikan berita dan cenderung sesuai dengan fakta realitas yang ada dan penekanan beritanya lebih tajam. Sedangkan SKH Media Indonesia cenderung menaruh perhatian dalam membahas suatu

berita dan menyajikannya kembali sebagai realitas baru. Adanya perbedaan pemberitaan antara SKH Kompas dan Media Indonesia kasus yang sama akhirnya akan mempengaruhi opini dan penilaian publik atas isu tersebut. Alasan lain yang mendasari menggunakan dua media cetak tersebut adalah keduanya merupakan SKH berskala nasional.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada saat Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sedang dibahas oleh DPR yaitu pada tanggal 4 sampai 8 Juli 2006.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan catatan yang dimiliki oleh unit analisis, sehingga dapat dimanfaatkan data serta melengkapi data.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus (Surakhmad, 1982: 163).

Sebagai data primer dalam penelitian ini data yang diambil sebanyak empat

buah berita dari SKH Kompas dan Media Indonesia edisi 4, 6 dan 8 Juli 2006

cetak untuk menarik perhatian khalayak, praktik seperti ini di media cetak adalah salah satu bagian dari aspek penonjolan supaya berita yang menjadi *headline* dapat menarik perhatian pembaca. Penempatan judul yang dijadikan *headline* di halaman muka atau belakang, pengulangan kata, pemberian foto atau gambar tertentu adalah salah satu praktik penonjolan dari dimensi seperti yang digambarkan oleh Entman dalam konsep framing.

Framing sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya (G.J. Adi Tjondro dalam Sudibyo, 1999:165).

Penelitian ini akan menggunakan konsep *framing* model Zhongdang Pan dan Kosicki karena dalam model ini elemen yang digunakan untuk menganalisis data lebih sesuai dengan objek yang akan di analisis. *Framing* dibagi dalam empat dimensi besar. Berikut ini adalah garis besar beberapa konsep *framing* secara rinci yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk mengungkap sebuah realitas isi pemberitaan dalam suatu media cetak.

Setiap berita memiliki *frame* yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. *Frame* adalah sebuah ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu kedalam bentuk teks secara keseluruhan, karena *frame* berhubungan dengan makna. Pembaca dalam memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan

Pan dan Kosicki menggunakan perangkat *framing* dalam menganalisis teks berita dibagi menjadi empat struktur besar, yaitu:

1. Struktur Sintaksis

Struktur Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa kedalam pernyataan, opini, kutipan serta pengamatan peristiwa yang disusun dalam bentuk berita. Hal ini dapat diamati dalam penulisan *lead* yang dipakai, latar informasi, *headline*, serta kutipan yang diambil. Inti dari struktur sintaksis adalah mengamati bagaimana wartawan memahami peristiwa yang dapat dilihat dari cara wartawan menyusun fakta.

Sintaksis dalam pengertian umum adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Sintaksis merujuk kepada pengertian susunan dari bagian seperti *headline*, *lead*, latar informasi, sumber, penutup dalam suatu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Sintaksis paling populer di kalangan wartawan dalam menyusun berita adalah struktur piramida terbalik. Struktur sintaksis berfungsi memberikan petunjuk tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak diarahkan kemana suatu berita akan dibawa (Eriyanto, 2002: 257)

Headline merupakan aspek sintaksis yang memiliki tingkat kementerian cukup tinggi, karena menunjukkan kecenderungan suatu berita, dan mempunyai tiga fungsi, yaitu mengiklankan berita, meringkaskan atau mengikhtisarkan cerita, dan memperbagus surat kabar (Anwar, 1996:11).

Headline dapat berfungsi mempengaruhi bagaimana suatu peristiwa dimengerti dan digunakan untuk menguraikan suatu isu dalam suatu peristiwa, *headline* berfungsi pula menjadi penanda dalam berita misalnya tanda tanya untuk

menjelaskan sebuah perubahan, tanda kutip untuk menunjukkan adanya jarak perbedaan.

Lead adalah perangkat sintaksis lain untuk menunjukkan perspektif tertentu dari suatu peristiwa yang diberitakan oleh media, dan merupakan intisari dari suatu berita (Sobur, 2001:77).

“Latar informasi dapat mempengaruhi bagian berita yang ingin ditampilkan. Seorang wartawan dalam menulis berita menggunakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis” (Nugroho, Eriyanto, Sundiarsis, 1999:32). Pengutipan sumber berita, adalah bagian penulisan berita lain yang penting. Hal ini dapat dimaksudkan untuk membangun keseimbangan untuk tidak memihak terhadap suatu berita yang diperistiwakan dan pengutipan sumber bertujuan untuk menekankan bahwa apa yang ditulis oleh wartawan adalah bukan semata-mata pendapat wartawan, melainkan pendapat dari orang yang memiliki otoritas tertentu.

Pengutipan sumber menjadikan perangkat *framing* yang kuat atas tiga hal (Nugroho, Eriyanto, Sundiarsis, 1999:33) antara lain:

Pertama, mengklaim kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan mendasarkan diri pada klaim otoritas akademik. Maksudnya adalah bahwa pendapat yang dikutip didukung oleh para ahli yang berkompeten walaupun sebenarnya wartawan mempunyai pendapat sendiri atas suatu peristiwa. *Kedua*, menghubungkan poin tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang berwenang. *Ketiga* mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu yang dihubungkan dengan kutipan atau pandangan mayoritas, sehingga pandangan tersebut nampak sebagai suatu penyimpangan.

II. Struktur Skrip

Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah 5 W + 1 H (*Who, What, Where, Why, and How*). Meskipun ini tidak selalu ditemukan dalam berita yang ditampilkan, namun kategori informasi diambil oleh wartawan untuk setiap penulisan dalam bentuk berita (Eriyanto, 2002:260). “Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa” (Sobur 2001:175-176). Ada dua hal berita yang disusun sebagai suatu cerita. *Pertama*, laporan berita yang berusaha menunjukkan peristiwa lanjutan dari peristiwa sebelumnya. *Kedua*, setiap berita mempunyai orientasi untuk menghubungkan dengan lingkungan komunal pembaca (Eriyanto, 2002:260).

III. Struktur Tematik

Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis, bagaimana kalimat yang dipergunakan dan penulisan sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan.

Dalam menulis berita, wartawan mempunyai tema atas suatu peristiwa tertentu. Pembuat teks dapat memanipulasi penafsiran pembaca tentang suatu peristiwa, untuk mensugesti dan meyakinkan khalayak akan kebenaran penulisan

Detail, elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan oleh komunikator. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Sebaliknya komunikator akan menampilkan informasi dalam jumlah sedikit apabila hal itu merugikan kedudukannya. Informasi yang menguntungkan komunikator tidak hanya ditampilkan secara berlebihan, akan tetapi akan mengalami penambahan detail secara lengkap, detail yang panjang dan lebar, serta ditambah dengan data-data untuk menonjolkan citra komunikator tersebut kepada pembaca.

Maksud, elemen wacana maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas, begitupun sebaliknya, apabila informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, tersembunyi, eufimistik dan berbelit-belit (Sobur, 2001:79).

Nominalisasi, elemen ini berhubungan dengan pertanyaan apakah komunikator memandang objek sebagai suatu yang tunggal, berdiri sendiri ataukah sebagai suatu kelompok (Nugroho, Eriyanto, Sundiarsis, 1999:34-35).

IV. Struktur Retoris

“Struktur retorik dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Wartawan menggunakan perangkat retorik untuk membuat citra, meningkatnya suatu penonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita” (Nugroho, Eriyanto, Sundiarsis, 1999:43). Struktur

... dan ... berita juga mempunyai kecenderungan bahwa ada yang

disampaikan oleh wartawan adalah kebenaran. Ada empat elemen struktur retorik yang dipergunakan wartawan yakni sebagai berikut:

Leksikon. Elemen ini menandakan bagaimana wartawan memilih kata dari berbagai kemungkinan kata atau frase yang tersedia (Sobur, 2001:82).

Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa sinonim yang merujuk pada fakta. Kata "Mati" misalnya memiliki sinonim: wafat, meninggal, tewas dan lain sebagainya. Dari beberapa pengambilan kata tersebut, wartawan dapat memilih diantara pilihan yang tersedia. Pilihan kata yang dipakai oleh seorang wartawan tidak semata-mata karena kebetulan, tetapi secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap realitas.

Garafis. Elemen grafis difungsikan untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan.

Dalam wacana berita grafis hadir melalui bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan dengan tulisan yang lainnya. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, huruf dengan ukuran besar, pemakaian garis bawah, termasuk didalamnya adalah pemakaian caption, grafik, gambar, tabel, untuk mendukung arti penting suatu pesan yang ingin disampaikan ke pembaca, karena wartawan menginginkan pembaca menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut (Nugroho, Eriyanto, Sudiarsis, 1999:45).

Pengandaian. Elemen ini merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Pengandaian merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung suatu teks (Sobur, 2001:79).

Pengandaian hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya dan karenanya tidak perlu untuk diragukan. Pengandaian adalah strategi yang dapat memberi kesan berbeda ketika diterima pembaca. Misal, pemakaian kata “SBY menghimbau agar para pejabat pemerintah tetap tenang menghadapi kritik dari masyarakat”, kata-kata ini memberikan kesan bahwa para pejabat pemerintah sering menanggapi berlebihan dengan kritik yang dilontarkan masyarakat.

Metafora. Dalam suatu wacana seorang wartawan tidak hanya menyampaikan pesan pokok dalam teks, tetapi juga kiasan dan ungkapan.

Metafora dimaksudkan sebagai ornamen dari suatu berita. Pemakaian metafora tertentu bisa menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks. Metafora dipakai oleh wartawan untuk landasan berfikir, alasan pembenar atas pendapat tertentu kepada publik (Sobur, 2001:84).

Tabel 1.3 Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki membuat skema *framing* yang lebih dikenal dengan nama skema *framing* model Pan dan Kosicki, sebagai berikut:

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	<i>Headline, Lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan penutup</i>

SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan Berita	5 W + 1 H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Maksud 5. Nominalisasi 6. Koherensi 7. Bentuk Kalimat 8. Kata ganti	Paragraf, Proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafora 12. Pengandaian	Kata, idiom, gambar atau foto, grafik

Sumber: Alex Sobur. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana,*

Analisis Semiotik dan Analisis Framing (2001: 176)